

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pembangunan Ekonomi dan Pertanian

Strategi pembangunan nasional melalui pembangunan pertanian di mana sektor pertanian menjadi pilar utamanya sehingga mencakup bidang yang sangat luas, baik dari sisi sosial budaya, ekonomi dan ekologi yang tentunya membutuhkan penanganan yang komprehensif dan integratif. Sebagai sektor andalan, sektor pertanian mempunyai peran langsung dan tidak langsung dalam perekonomian nasional. Peran langsung sektor pertanian dalam perekonomian nasional adalah penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia sumber devisa melalui ekspor, penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, peran tidak langsung sektor pertanian dalam perekonomian nasional, yaitu melalui efek pengganda (*multiplier effect*) berupa keterkaitan faktor input dan output antar industri, konsumsi dan investasi. Oleh sebab itu, pembangunan sektor pertanian berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pertanian yang mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang (Arifin, 2003).

Pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok yaitu: (1) pertumbuhan, (2) penanggulangan kemiskinan, (3) perubahan atau transformasi ekonomi, dan (4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan: (1) merosotnya pangsa sektor primer (pertanian), (2) meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri), dan (3) pangsa sektor tersier (jasa) kurang lebih konstan, namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Kariyasa, 2002).

Menurut Hayami dan Ruttan (1985), perubahan struktur sektor pertanian yaitu perubahan pola komposisi produksi, urutan produksi dan perubahan sumberdaya yang digunakan. Dalam proses pertumbuhan ekonomi, pangsa sektor pertanian baik dalam PDB maupun dalam kesempatan kerja menurun sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Proses pertumbuhan PDB juga disertai pertumbuhan sektor pertanian yang meningkat dengan cepat bersamaan dan bahkan mendahului pertumbuhan PDB.

Sektor industri mempunyai ketergantungan yang erat dengan sektor pertanian. Perkembangan sektor industri akan disertai dengan penurunan keuntungan jika tidak didukung oleh perkembangan sektor pertanian. Hal ini disebabkan oleh karena sektor industri tidak menghasilkan bahan

makanan. Sektor industri tidak dapat berkembang tanpa didukung perkembangan sektor pertanian. Adanya keserasian antara pertumbuhan sektor pertanian dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian mempunyai keterkaitan dengan kebijakan ekonomi secara keseluruhan.

Kemudian, terjadi mobilitas tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Adanya sifat perkembangan penduduk dan masalah pengangguran di negara berkembang, mendorong ahli ekonomi untuk membuat teori mengenai corak pembangunan dan perubahan struktur ekonomi dalam suatu masyarakat di mana: (1) penduduknya sebagian besar masih menjalankan kegiatan di sektor pertanian yang tradisional, dan (2) sektor tersebut mempunyai kelebihan jumlah tenaga kerja sehingga menghadapi masalah pengangguran terbuka dan tersembunyi yang serius.

Agribisnis merupakan usaha ekonomi rasional yang berorientasi pasar mempunyai spesifikasi terhadap pola penelitian pengembangan teknologi pertanian dan analisis mikro di tingkat usahatani. Pengembangan teknologi hendaknya lebih dirasakan pada upaya untuk mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi. Pola pengembangan teknologi yang demikian disebut *Induced Innovation Model*. Dalam model tersebut dijelaskan adanya keterkaitan antara empat faktor, yaitu: (1) *resource endowment* (dukungan sumber daya), (2) *cultural endowment* (dukungan budaya), (3) *technology* (teknologi), dan (4) *institutions* (kelembagaan).

Dalam konteks ini, pengembangan kelembagaan kemitraan usaha terpadu guna mendukung pembangunan pertanian haruslah mempertimbangkan keterkaitan ke empat hal pokok di atas. Kemudian, pada pengembangan teknologi merupakan upaya untuk mencapai keuntungan dan efisiensi ekonomi usahatani wilayah.

Terdapat lima syarat pokok yang diperlukan untuk menggerakkan dan membangun pertanian yaitu (Mosher, 1991):

- a. Adanya pasar untuk hasil usaha tani.
- b. Teknologi yang senantiasa berkembang.
- c. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal.
- d. Adanya perangsang produksi bagi petani.
- e. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu.

Di samping lima syarat mutlak, terdapat syarat pelancar, yaitu pendidikan pembangunan, kredit produksi, kegiatan gotong royong petani, perbaikan dan perluasan tanah pertanian serta perencanaan nasional pembangunan pertanian. Syarat-syarat tersebut di atas dapat dikelompokkan kepada dua hal, yaitu:

- a. Perangsang pembangunan pertanian
 - (1). Adanya rencana pembangunan yang memberi prioritas pada pembangunan pertanian.
 - (2). Adanya kebijakan-kebijakan khusus, seperti subsidi harga pupuk, kegiatan penyuluhan yang intensif, perlombaan dengan hadiah-hadiah yang menarik pada petani teladan, dan pendidikan

pembangunan pada petani-petani di desa baik mengenai teknik baru dalam pertanian maupun mengenai keterampilan lainnya yang membantu menciptakan iklim yang menggiatkan usaha pembangunan.

b. Faktor-faktor fisik dan sosial

- (1). Tersedianya secara lokal kebutuhan akan sarana pertanian, seperti bibit unggul, pupuk dan obat-obatan.
- (2). Adanya lembaga perbankan yang siap melayani dan meminjamkan kredit dengan persyaratan yang tidak berat.
- (3). Pengembangan usaha koperasi melalui peningkatan mutu pengurus koperasi yang ada dan pendidikan kader-kader baru, membantu dan membina sistem pembukuan dan lain-lain.

Mubyarto (1985) mengemukakan bahwa tidak semua model pembangunan pertanian bisa diimplementasikan oleh negara-negara yang sedang berkembang di dalam membangun pertaniannya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi-kondisi kas dari negara yang bersangkutan seperti sosial-ekonomi, politik, teknologi dan kebudayaan yang tidak memungkinkan penerapan model pembangunan pertanian dari negara luar tersebut secara keseluruhan. Namun, setidaknya Indonesia bisa belajar dari Taiwan tentang cara-cara mengatur organisasi pertaniannya, antara lain merangsang kerja petani, pembangunan jalan-jalan oleh negara dan dibiayai kegiatan-kegiatan penelitiannya.

Pembangunan pedesaan dan pertanian di Indonesia merupakan sinergi yang perlu diciptakan. Keduanya memiliki multiplier berspektrum luas. Posisi yang lemah dari sektor pertanian menyebabkan tidak seimbangnya nilai tukar (*term of trade*) antara hasil pertanian dan produk industri. Pembentukan modal dan akumulasi kapital sangat sulit dilakukan di daerah pedesaan yang pada umumnya hidup dari sektor pertanian. Perluasan kegiatan ekonomi tentu sulit dilakukan. Selanjutnya Sujarwo (2010) menyatakan bahwa ada beberapa upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi pedesaan, antara lain (1) perlu identifikasi bidang-bidang usaha di pedesaan, baik primer, sekunder dan tersier, (2) klasifikasi petani, untuk melihat kemungkinan kerjasama antar kelas-kelas petani, dan (3) identifikasi sumber daya, seperti modal, fasilitas, keahlian dan tanah.

Pembangunan pedesaan tidak terlepas dari membangun masyarakat di pedesaan sehingga mau dan mampu untuk berusaha dalam mensejahterakan hidupnya. Menurut Chambers (1995) dalam Kartasmita (1997), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*". Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Konsep pemikiran ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.

Menurut Rusastra dkk. (2002), petani sangat tergantung pada banyak pihak, antara lain pada bantuan subsidi, dukungan harga dan perlindungan dari pemerintah, yang biasanya tidak efisien dan tidak sesuai pula dengan prinsip persaingan bebas. Petani kecil sangat tergantung pada golongan petani lahan luas atau pedagang untuk memperoleh aset produktif (lahan, peralatan), modal kerja dan perolehan sarana produksi. Demikian juga dalam penjualan hasil petani sangat tergantung pada pedagang hasil. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan petani melalui pengembangan kelompok tani dan melalui kemitraan usaha agribisnis konsolidatif sebagai langkah strategis. Menurut Asjid (1980) dalam Supadi (2004), petani adalah pengusaha yang bertindak rasional, yang akan memberikan respon secara dinamis terhadap bekerjanya mekanisme pasar. Dengan demikian mekanisme pasar menjadi dasar dari penggerakan proses partisipasi petani dalam intensifikasi.

Selanjutnya Supadi (2004) menyatakan bahwa petani adalah pelaku utama yang harus diberdayakan. Tahap awal yang perlu ditempuh untuk memberdayakan petani adalah membentuk kelembagaan berupa kelompok tani yang merupakan organisasi kerjasama. Kerjasama sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi pada dasarnya sangat sulit bila dihadapi secara individu. Selama ini petani lemah dalam menentukan harga produksinya karena sulit mendapat akses informasi pasar. Selanjutnya melalui penyuluhan (pendidikan dan latihan) yang berkelanjutan terhadap kelompok yang mendapat pembinaan tersebut diharapkan menghasilkan sumberdaya manusia petani yang memiliki

pengetahuan dan keterampilan dalam berusahatani.

Untuk dapat berusahatani lebih teratur dan terarah maka kelembagaan kelompok tani perlu menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak pengusaha. Keterkaitan dan kerjasama kelembagaan kelompok tani dengan pihak pengusaha dapat terjalin secara baik bila terdapat saling ketergantungan dan kerjasama yang bersifat simetri serta saling menguntungkan. Kemitraan dalam hal ini identik dengan konsolidasi vertikal yang memadukan segmen kegiatan usahatani, pengolahan hingga pemasaran.

Peran pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program diharapkan dapat mendorong dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta menggairahkan petani maupun pihak pengusaha, sehingga agribisnis dapat berkembang. Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan motivator yang harus mensesuaikan hubungan antar pelaku agribisnis tersebut, sehingga para pelaku dapat berinteraksi secara proporsional dan tidak terjadi eksploitasi yang bersifat kontradiktif. Para pelaku usaha bisa meraih keuntungan yang seimbang.

Dengan terjadinya keterpaduan berbagai unsur tersebut (kelompok tani, pengusaha dan pemerintah) diharapkan agribisnis yang bersifat konsolidatif vertikal atau kemitraan tersebut dapat berkembang (Supadi, 2004).

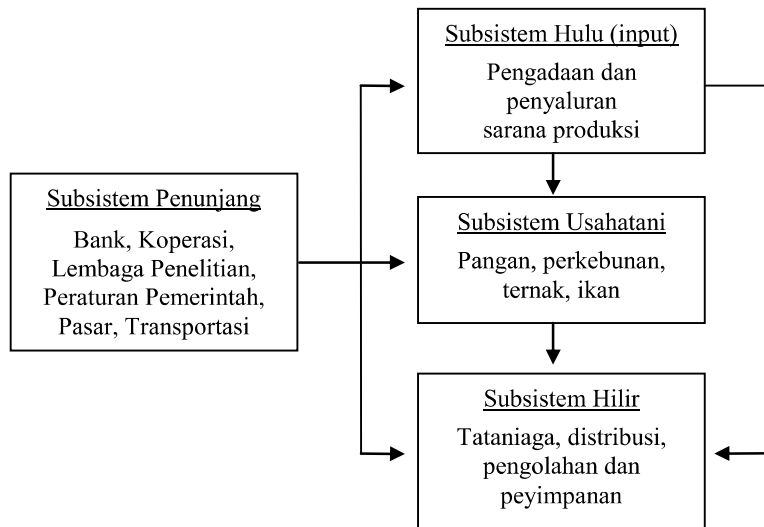
2. Teori Agribisnis

Arsyad, dkk (1985) dalam Soekartawi (1991) menyatakan bahwa agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran, yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas.

Yang dimaksud dengan ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

Menurut Sutawi (2002) menyatakan bahwa agribisnis suatu cara lain untuk melihat pertanian sebagai suatu sistem bisnis yang terdiri dari : (1) subsistem agribisnis hulu yang berupa kegiatan ekonomi input produksi, informasi, dan teknologi, (2) subsistem usahatani, (3) subsistem pengolahan, (4) subsistem pemasaran dan lembaga penunjang (*supporting institution*), yaitu dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agribisnis. Secara sederhana sistem agribisnis dapat dilihat pada Gambar 1.

Dengan menggunakan acuan seperti ini, aktivitas agribisnis tidak lagi sekedar berorientasi pada produksi semata, sebagaimana yang dilakukan pada agribisnis tradisional. Agribisnis dengan demikian bukan saja semata-mata dalam konteks pemenuhan kebutuhan masyarakat pedesaan, tetapi juga dalam rangka memperoleh nilai tambah yang lebih besar, sehingga kegiatan *off-farm* seperti agroindustri dan marketing menjadi sangat penting.



Gambar 1. Keterkaitan dalam sistem agribisnis
Sumber : Firdaus, 2007

Pada subsistem agribisnis hulu mencakup semua kegiatan untuk memproduksi dan menyalurkan input-input pertanian dalam arti luas. Selain sarana produksi yang terdiri dari lahan, bibit, benih, pupuk, obat-obatan, dan tenaga kerja, faktor modal yang juga tidak kalah pentingnya dalam produksi pertanian dalam arti sumbangannya pada nilai produksi. Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja dapat menghasilkan barang baru yang dalam hal ini adalah hasil pertanian. Modal usahatani yang digunakan dapat berasal dari modal pribadi atau bantuan dari pihak-lainnya seperti pemerintah, swasta, dan perorangan. Pihak pemerintah yang memberikan bantuan disalurkan oleh bank-bank pemerintah. Pihak swasta yang memberikan bantuan adalah perusahaan pertanian dan sistem yang dipakai adalah sistem kemitraan. Pihak perorangan yang memberikan bantuan didasarkan atas ketentuan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Pada subsistem usahatani, Soekartawi (1991) menyatakan bahwa ilmu usahatani diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu.

Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka sebaik-baiknya dan dikatakan efisien apabila pemanfaatan sumber daya tersebut menghasilkan keluaran (*output*) yang melebihi masukan (*input*). Pada proses produksi, kemitraan antara petani dan perusahaan mitra sangat diperlukan agar produktivitas petani dapat meningkat. Hal ini dilakukan dengan pembinaan kepada petani berupa transfer teknologi dalam berbudidaya.

Pada subsistem pengolahan, hasil produksi yang dihasilkan kemudian diproses dan mentransformasikan produk mentah hasil pertanian menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, yang dapat langsung dikonsumsi atau digunakan dalam proses produksi kembali. Biasanya proses pengolahan ini dilakukan oleh agroindustri. Agroindustri terdiri dari dua suku kata, yaitu agro yang berasal dari kata *agriculture* yang berarti pertanian dan industri. Jadi, agroindustri merupakan industri yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian.

Pada subsistem pemasaran dan lembaga penunjang saling berkaitan. Menurut Kartasapoetra (1992), pemasaran yaitu meliputi segala kegiatan usaha yang dilakukan agar barang-barang hasil produksi dari produsen dapat mengalir secara lancar ke sektor konsumsi (konsumen). Oleh sebab

itu, peranan lembaga pemasaran adalah sedemikian besar. Lembaga pemasaran adalah segala usaha lembaga yang terkait dalam jaringan lalu lintas barang-barang di masyarakat.

Proses tataniaga memiliki beberapa fungsi yang harus ditampung oleh pihak produsen dan lembaga-lembaga atau mata rantai penyaluran produk-produknya, seringkali fungsi-fungsi tersebut menimbulkan masalah-masalah yang harus dipecahkan, baik oleh pihak produsen yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga yang merupakan mata rantai saluran produk-produknya itu. Fungsi-fungsi yang dimaksud di atas ialah: (1) Pembelian (*buying*), pengumpulan (*assembling*), dapat dikelompokkan ke dalamnya, (2) penjualan (*selling*), (3) penyebaran (*distribusi*), (4) pengangkutan (*transportation*), (5) penyimpanan (*storage*), (6) pengelolaan, (7) pembiayaan atau pendanaan (*financing*), (8) risiko, dan (9) informasi pasar (*market information*).

Fungsi-fungsi di atas dapat dipenuhi dengan cara bekerja sama (kemitraan) dengan lembaga-lembaga pemasaran tersebut sehingga dapat mengurangi biaya tataniaga. Selain itu, dengan cara kemitraan dengan pihak swasta dapat membantu memecahkan masalah ketimpangan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta ketimpangan pendapatan atau hilangnya peluang memperoleh tambahan keuntungan bagi petani maupun pada konsumen.

3. Teori Kemitraan

Menurut Soemardjo dkk. (2004), kemitraan agribisnis merupakan kemitraan yang mengacu pada hubungan sosial dan bisnis di antara para pelaku dan pendukung usaha kegiatan agribisnis. Kerjasama kemitraan ini mempunyai hubungan moral dan struktural antara suatu kelompok orang dengan orang lain. Menurut Mardikanto (1993), kemitraan adalah kerjasama yang sinergis antar dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kerjasama tersebut merupakan pertukaran sosial yang saling memberi, bersifat timbal balik dan saling menerima. Kemitraan yang sinergis berjalan jika semua informasi, teknologi, kelembagaan, input, pasar, dan risiko kegagalan berlangsung transparan. Ketransparanan yang dibutuhkan tetap berada pada batas-batas kepentingan bisnis dalam tatanan yang seimbang dan berlangsung dua arah. Pada tatanan bisnis, program kemitraan agribisnis melibatkan petani plasma, organisasi kelompok tani, dan perusahaan inti. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sedangkan tiga pihak yang disebut terdahulu berperan sebagai kunci dalam pembangunan kemitraan agribisnis.

Hafsah (2003) menyatakan bahwa tujuan kemitraan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan adalah meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah serta nasional, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan ketahanan ekonomi

nasional. Selanjutnya, manfaat kemitraan adalah segala sesuatu atau hasil yang didapat perusahaan atau petani dari pelaksanaan kemitraan tersebut, seperti peningkatan ketrampilan, pengetahuan, pendapatan, serta peningkatan hasil produksi.

Pola kerjasama melalui kemitraan usaha yang berjalan di sektor tanaman pangan selama ini ada beberapa macam dan penerapannya disesuaikan dengan perusahaan, petani dan kondisi daerah setempat. Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 pasal 26 tentang Usaha Kecil disebutkan bahwa kemitraan dilakukan dengan pola-pola :

a. Pola inti plasma

Merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil (petani) selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

b. Pola subkontrak

Merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar. Dalam hubungan kemitraan, usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar, sebagai bagian dari produksinya.

c. Pola dagang umum

Merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau sebagai pemasok kebutuhan usaha menengah atau usaha besar.

d. Pola waralaba

Merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merk dagang, dan saluran distribusi perusahaan kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

e. Pola keagenan

Merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak leluasa untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah dan usaha besar.

f. Pola bentuk-bentuk lain

Merupakan pola kemitraan di luar pola-pola di atas yang pada saat ini sudah berkembang tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Dari beberapa jenis pola kemitraan di atas, kemitraan jagung Sibermas antara petani jagung dan perusahaan pakan ternak dapat digolongkan dalam pola subkontrak dan pola dagang umum. Dalam kemitraan jagung Sibermas, petani jagung mendapatkan bantuan pinjaman berupa benih

jagung dan memiliki berkewajiban menjual hasil produksinya kepada perusahaan pakan ternak, sebagai salah satu komponen produksinya.

4. Teori Pendapatan Usahatani

Pendapatan merupakan faktor yang dapat memotivasi petani untuk mendapatkan produksi yang optimal. Keberhasilan dari suatu usahatani dapat diketahui dari besarnya pendapatan yang diperoleh oleh petani. Besarnya pendapatan yang diperoleh dari usahatani merupakan keberhasilan petani dalam mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produksi. Menurut Hernanto (1994), analisis pendapatan terhadap usahatani penting dalam kaitannya dengan tujuan yang hendak akan dicapai oleh setiap usahatani dengan berbagai pertimbangan dan motivasinya. Analisis pendapatan pada dasarnya memerlukan dua keterangan pokok yaitu: (1) keadaan penerimaan, dan (2) keadaan pengeluaran (biaya produksi) selama jangka waktu tertentu. Menurut Soekartawi (1994) terdapat dua pengertian mengenai pendapatan usahatani, yaitu (1) pendapatan kotor (penerimaan), yaitu pendapatan yang diperoleh petani dalam usahatannya selama satu tahun atau satu kali proses produksi yang diperhitungkan dari hasil penjualan usahatannya, (2) pendapatan bersih, yaitu hasil pendapatan keseluruhan atau pendapatan kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi.

Menurut Soekartawi (1994), biaya usahatani berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Biaya tetap, yaitu biaya yang besar kecilnya tidak bergantung pada besar kecilnya produksi dan dapat digunakan lebih dari satu kali proses produksi. Sewa atau bunga tanah berupa uang adalah contoh dari biaya tetap.
- b. Biaya variabel, yaitu biaya yang besar kecilnya berhubungan dengan besar kecilnya produksi. Pengeluaran membeli bibit, obat-obatan, biaya persiapan, dan biaya pembuatan kandang adalah contoh dari biaya variabel.

Pendapatan selain diukur dengan nilai mutlak dapat pula diukur nilai efisiensinya. Salah satu alat untuk mengukur efisiensi pendapatan tersebut yaitu penerimaan untuk setiap biaya yang dikeluarkan atau imbalan penerimaan dengan biaya atau *revenue and cost ratio* (analisis R/C rasio). Perbandingan ini menunjukkan penerimaan kotor untuk setiap rupiah yang dikeluarkan dalam usahatani. Semakin tinggi nilai R/C rasio menunjukkan semakin besar penerimaan yang diperoleh dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Sehingga dengan perolehan nilai R/C rasio yang semakin tinggi maka tingkat pendapatan pun semakin baik.

Berhasilnya usahatani dapat diketahui dari besarnya pendapatan yang diperoleh. Usaha untuk meningkatkan pendapatan petani adalah dengan meningkatkan produksi. Memperoleh produksi yang maksimum dari usahatani, diperlukan usaha dalam memadu faktor-faktor produksi dengan

keterampilan manajemen tertentu. Besar kecilnya pendapatan yang diterima petani dipengaruhi oleh tingkat kecakapan petani mengelola usahatannya dari sumber produksi yang tersedia. Perencanaan usahatani yang baik akan terlihat dari analisis pendapatan yang diterima, sehingga akan disusun rencana yang baik untuk masa tanam selanjutnya (Hadisapoetra, 1993).

5. Nilai Ekonomi Lahan (*Land Rent*)

Lahan memiliki nilai ekonomi dan nilai pasar yang berbeda-beda. Lahan di perkotaan yang digunakan untuk kegiatan industri dan perdagangan memiliki nilai pasar yang tertinggi karena di tempat tersebut terletak tempat tinggal dan sumber penghidupan manusia yang paling efisien dan memberikan nilai produksi yang tertinggi. Para pemilik sumberdaya lahan cenderung menggunakan lahan untuk tujuan-tujuan yang memberikan harapan untuk diperolehnya penghasilan yang tertinggi. Mereka akan menggunakan lahannya sesuai dengan konsep penggunaan yang tertinggi dan terbaik. Konsep ini memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi kemampuan lahan, seperti aksesibilitas serta kualitas sumberdaya lahan dan lingkungan. Penggunaan yang terbaik dan tertinggi biasanya untuk daerah industri dan perdagangan, menyusul untuk daerah permukiman, kemudian untuk daerah pertanian, dan yang terakhir untuk ladang penggembalaan dan daerah liar yang tidak ditanami (Suparmoko, 1989).

Menurut Hardjowigeno dalam Akib (2002), lahan paling sedikit mempunyai tiga jenis nilai dalam ekonomi lahan, yaitu :

- a. *Ricardian Rent*, nilai lahan yang berkaitan dengan sifat dan kualitas tanah.
- b. *Locational Rent*, nilai lahansehubungan dengan sifat lokasi relatif dari lahan.
- c. *Enviromental Rent*, sifat tanah sebagai komponen utama ekosistem.

Menurut Barlowe (1978) dalam Pambudi (2008) nilai ekonomi lahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Sewa Lahan (*contract rent*) sebagai pembayaran dari penyewa kepada pemilik dimana pemilik melakukan kontrak sewa dalam jangka waktu tertentu.
- b. Keuntungan usaha (*economic rent* atau *land rent*) yang merupakan surplus pendapatan di atas biaya produksi atau harga input lahan yang memungkinkan faktor produksi lahan dapat dimanfaatkan dalam proses produksi.

Pada penelitian ini istilah nilai ekonomi lahan (*land rent*) yang digunakan adalah konsep yang kedua dari penjelasan Barlowe tersebut yaitu keuntungan usaha atau *economic rent* dari suatu usaha yang dilakukan pada suatu lahan tertentu. *Land rent* merupakan konsep yang penting dalam mempelajari penerimaan ekonomi dari penggunaan sumberdaya lahan untuk produksi. *Land rent* dapat didefinisikan sebagai surplus ekonomi yaitu merupakan kelebihan nilai produksi total di atas biaya total

(Suparmoko, 1989). Sementara, menurut Nasution (1991) dalam Rahim (2007), *land rent* merupakan pendapatan bersih yang diperoleh suatu pelaku ekonomi melalui kegiatan yang dilakukan pada suatu unit ruang dengan teknologi dan efisiensi manajemen tertentu dan dalam suatu kurun waktu tertentu secara formal (biasanya satu tahun). Oleh karena itu, suatu bidang lahan tidak mempunyai nilai ekonomi lahan selama tidak melakukan usaha atau kegiatan pada lahan tersebut.

Mubyarto (1985) menjelaskan pula bahwa sewa ekonomi lahan merupakan bagian dari nilai produksi lahan yang merupakan bagian dari nilai produksi secara keseluruhan sebagai hasil usaha yang dilakukan pada lahan tersebut. Jasa produksi lahan tersebut merupakan jasa yang diperoleh dari pengelolaan lahan bukan jasa karena pemilikan lahan tersebut. Surplus ekonomi dari sumberdaya lahan dapat dilihat dari surplus ekonomi karena kesuburan tanahnya dan surplus ekonomi karena lokasi ekonomi.

Menurut Barlowe (1978) dalam Pambudi (2008) secara umum besaran *land rent* dari berbagai kegiatan dapat diurutkan: Industri > Perdagangan > Permukiman > Pertanian Intensif > Pertanian Ekstensif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sektor-sektor yang komersial dan strategis mempunyai *land rent* yang tinggi sehingga sektor-sektor tersebut berada di kawasan strategis.

6. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peneliti harus mempelajari penelitian sejenis di masa lalu untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu akan memberikan gambaran kepada penulis tentang penelitian sejenis yang akan dilakukan. Untuk itu penulis juga melakukan penelusuran tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutaqin (2008), dalam analisis kinerja kelembagaan agribisnis dan efisiensi teknik usahatani padi (kasus petani binaan lembaga pertanian sehat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat), menyatakan bahwa keragaan dari kelembagaan agribisnis yang dibangun oleh LPS telah memenuhi kelengkapan sistem agribisnis yang terdiri dari subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budidaya/usahatani, subsistem agribisnis hilir dan subsistem jasa penunjang.

Apabila dilihat dari kepentingan petani, subsistem hilir masih kurang mendukung. Hal tersebut dikarenakan pengolahan produk primer menjadi produk olahan berupa beras SAE masih terbatas bagi beberapa kelompok di kecamatan Cigombong saja. Sementara hasil panen sebagian besar kelompok di luar Kecamatan Cigombong, sebanyak delapan kelompok, dijual ke penggilingan dalam bentuk GKP, selain untuk kebutuhan sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2008), dalam analisis manfaat dan faktor-faktor yang mempengaruhi petani terhadap pelaksanaan kemitraan *lettuce* di PT. Saung Mirwan, menyatakan bahwa pola

kemitraan yang diterapkan PT. Saung Mirwan dengan petani mitra dikategorikan ke dalam pola KOA (Kerjasama Operasional Agribisnis). PT. Saung Mirwan sebagai pihak perusahaan mitra menyediakan pinjaman sarana produksi berupa bibit, bimbingan teknis budidaya dan jaminan pasar. Sedangkan petani mitra menyediakan lahan, tenaga kerja dan sarana. Hasil analisis deskriptif tentang pelaksanaan kemitraan yaitu petani mitra memperoleh manfaat dalam hal pemasaran, harga lebih baik, keuntungan lebih tinggi, bantuan teknis budidaya dan memiliki ikatan kekeluargaan dengan perusahaan mitra. Sedangkan pihak perusahaan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku produksi, yaitu sayuran *lettuce*.

Sulistyo (2004) melakukan penelitian tentang pengaruh kemitraan terhadap penggunaan faktor produksi dan pendapatan usahatani ubikayu di Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa R/C rasio atas biaya tunai dan biaya total petani peserta kemitraan lebih tinggi, yaitu sebesar 1,77 dan 1,68 dibandingkan dengan R/C rasio atas biaya tunai dan biaya total petani bukan peserta kemitraan, yaitu sebesar 1,52 dan 1,48. Artinya kegiatan usahatani peserta kemitraan lebih efisien dibandingkan dengan petani bukan peserta.

Ongkowijono (2006) dalam penelitiannya mengenai perbandingan nilai ekonomi lahan (*land rent*) antara lahan komoditas hortikultura dengan padi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan Pacet dan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, berdasarkan hasil analisis *land rent*,

untuk komoditi hortikultura diperoleh nilai dari kisaran Rp.2.993,00 – Rp.17.304,00, sedangkan untuk *land rent* komoditas padi sebesar Rp.517,00. Dengan menggunakan analisis regresi berganda dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *land rent* yaitu luas tanam, benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, pajak, alat produksi, dan nilai sisa alat.

Pambudi (2008) dalam penelitiannya mengenai analisis nilai ekonomi lahan (*land rent*) pada lahan pertanian dan permukiman di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, berdasarkan analisis pertumbuhan perubahan penggunaan lahan pertanian dalam kurun waktu tujuh tahun mengalami penurunan dengan laju pertumbuhan sebesar -2,70 persen tiap tahunnya. Sedangkan pada lahan permukiman mengalami penambahan dengan laju pertumbuhan sebesar 3,96 persen tiap tahunnya. Pada hasil perhitungan *land rent*, *land rent* lahan permukiman lebih besar 79 kali dibandingkan *land rent* lahan pertanian. Sedangkan, keuntungan yang tidak diperoleh oleh pihak petani atas hilangnya kesempatan akibat konsekuensi mereka dalam mempertahankan lahan pertanian (*opportunity cost*) sebesar Rp 100.911,00/m²/tahun.

Tabel 7. Ringkasan tinjauan penelitian terdahulu

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	2008	Amir Mutakin	Analisis kinerja kelembagaan agribisnis dan efisiensi teknik usahatani padi (kasus petani binaan lembaga pertanian sehat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat).	Analisis kualitatif dan analisis tingkatefisiensi teknik dengan program Front.41.	Keragaan dari kelembagaan agribisnis yang dibangun oleh LPS telah memenuhi kelengkapan sistem agribisnis yang terdiri dari subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budidaya/usahatani, subsistem agribisnis hilir dan subsistem jasa penunjang. Akan tetapi, apabila dilihat dari kepentingan petani, subsistem hilir masih kurang mendukung. Hal tersebut dikarenakan pengolahan produk primer menjadi produk olahan berupa beras SAE masih terbatas bagi beberapa kelompok di kecamatan Cigombong saja. Sementara hasil panen sebagian besar kelompok di luar Kecamatan Cigombong, sebanyak delapan kelompok, dijual ke penggilingan dalam bentuk GKP, selain untuk kebutuhan sendiri.
2.	2008	Marliana	Analisis manfaat dan faktor-faktor yang mempengaruhi petani terhadap pelaksanaan kemitraan <i>lettuce</i> di PT. Saung Mirwan.	Metode analisis kualitatif (deskriptif), analisis pendapatan usahatani dan analisis regresi logistik.	Pola kemitraan yang diterapkan PT. Saung Mirwan dengan petani mitra adalah pola KOA (Kerjasama Operasional Agribisnis). Perusahaan mitra menyediakan pinjaman sarana produksi berupa bibit, bimbingan teknis budidaya dan jaminan pasar. Sedangkan petani mitra menyediakan lahan, tenaga kerja dan sarana. Hasil analisis deskriptif tentang pelaksanaan kemitraan yaitu petani mitra memperoleh manfaat dalam hal pemasaran, harga lebih baik, keuntungan lebih tinggi, bantuan teknis budidaya dan memiliki ikatan kekeluargaan dengan petani mitra. Sedangkan pihak perusahaan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku produksi, yaitu sayuran <i>lettuce</i> .

<p>Kendala yang dialami perusahaan yaitu terbatasnya tenaga penyuluh sehingga kunjungan penyuluh dirasakan masih kurang optimal. Pengadaan bibit menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kemitraan. Manajemen <i>packaging</i> pada PT Saung Mirwan dinilai masih kurang terkoordinasi dengan baik. Sebagian petani ada yang merasa dirugikan dalam penerimaan hasil panen yaitu hasil panen petani masuk ke petani lain.</p>		
<p>Manfaat yang dirasakan petani yaitu kemudahan dalam pemasaran, harga lebih baik, keuntungan lebih tinggi, bantuan budidaya, serta memiliki ikatan kuat atau jalinan kekeluargaan dengan petani. Manfaat teknis lainnya yaitu adanya penyediaan bibit, sehingga petani mitra tidak perlu melakukan pembibitan sendiri.</p>		
<p>R/C rasio atas biaya tunai dan biaya total petani peserta kemitraan lebih tinggi, yaitu sebesar 1,77 dan 1,68 dibandingkan dengan R/C rasio atas biaya tunai dan biaya total petani bukan peserta kemitraan, yaitu sebesar 1,52 dan 1,48. Artinya kegiatan usahatani peserta kemitraan lebih efisien dibandingkan dengan petani bukan peserta.</p>	<p>Analisis produksi dan analisis pendapatan usahatani.</p>	<p>Analisis pengaruh kemitraan terhadap efisiensi penggunaan faktor produksi dan pendapatan usahatani ubikayu.</p>
<p>Berdasarkan hasil analisis <i>land rent</i>, untuk komoditi hortikultura diperoleh nilai dari kisaran Rp.2.993,00 – Rp.17.304,00, sedangkan untuk <i>land rent</i> komoditas padi sebesar Rp.517,00. Dengan menggunakan analisis regresi berganda dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap <i>land rent</i> yaitu luas tanam, benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, pajak, alat produksi, dan nilai sisa alat.</p>	<p>Analisis <i>land rent</i> dan analisis regresi berganda.</p>	<p>Analisis perbandingan nilai ekonomi lahan (<i>land rent</i>) antara lahan komoditas hortikultura dengan padi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan Pacet dan Warungkondang, Kabupaten Cianjur.</p>

5. 2008	Pambudi	Analisis nilai ekonomi lahan (<i>land rent</i>) pada lahan pertanian dan permukiman di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor	Analisis pertumbuhan, analisis nilai ekonomi lahan (<i>land rent</i>), dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi <i>land rent</i> secara statistik menggunakan analisis regresi berganda.	Berdasarkan analisis pertumbuhan perubahan penggunaan lahan pertanian dalam kurun waktu tujuh tahun mengalami penurunan dengan laju pertumbuhan sebesar -2,70 persen tiap tahunnya. Sedangkan pada lahan permukiman mengalami penambahan dengan laju pertumbuhan sebesar 3,96 persen tiap tahunnya. Pada hasil perhitungan <i>land rent</i> , <i>land rent</i> lahan permukiman lebih besar 79 kali dibandingkan <i>land rent</i> lahan pertanian. Sedangkan, keuntungan yang tidak diperoleh oleh pihak petani atas hilangnya kesempatan akibat konsekuensi mereka dalam mempertahankan lahan pertanian (<i>opportunity cost</i>) sebesar Rp.100.911,00/m ² /tahun
---------	---------	---	--	--

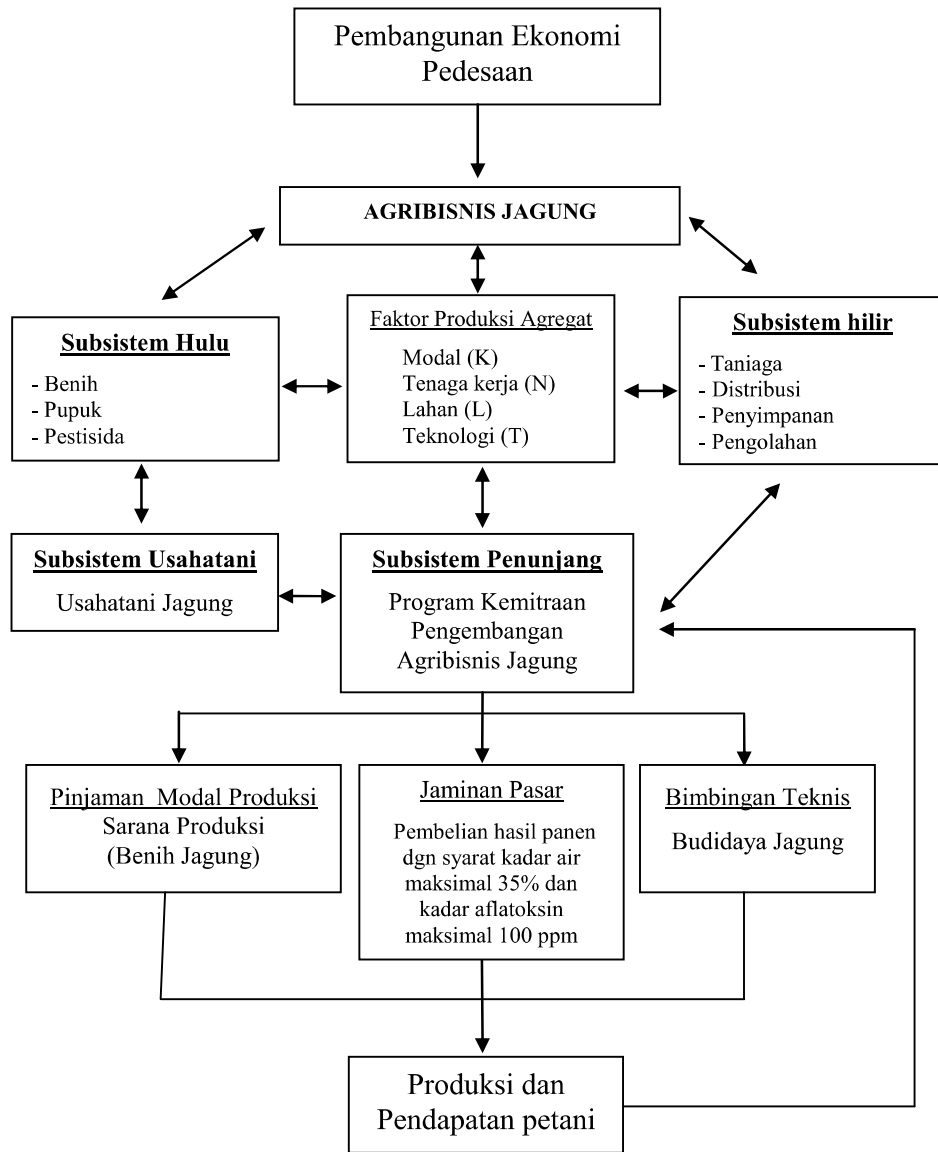
B. Kerangka Pemikiran

Pembangunan pedesaan tidak terlepas dari membangun masyarakat di pedesaan sehingga mau dan mampu untuk berusaha dalam mensejahterakan hidupnya. Upaya pemberdayaan petani melalui pengembangan kelompok tani dan melalui kemitraan usaha agribisnis konsolidatif sebagai langkah strategis. Selain itu, pembangunan Ekonomi di suatu desa erat kaitanya dengan sistem agribisnis. Agribisnis merupakan suatu cara lain untuk melihat pertanian sebagai suatu sistem bisnis yang terdiri dari empat subsistem yang terkait satu sama lain. Keempat subsistem tersebut adalah (1) subsistem agribisnis hulu, yang mencakup semua kegiatan memproduksi dan menyalurkan input-input pertanian, seperti benih, pupuk dan pestisida. (2) subsistem agribisnis usahatani, merupakan kegiatan usahatani yang berupaya mengelola input menjadi output untuk menghasilkan produk pertanian. (3) subsistem agribisnis hilir, sering disebut sebagai agroindustri yang merupakan pengolahan hasil produk-produk pertanian. Subsistem ini juga mencakup kegiatan pemasaran (tataniaga), pengolahan, dan kegiatan penyimpanan. (4) Subsistem agribisnis penunjang, mencakup kegiatan jasa yang melayani pertanian, seperti kebijakan pemerintah, perbankan, penyuluhan, pembiayaan, dan lain-lain.

Kemitraan pengembangan agribisnis jagung melalui Program Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Sibermas) termasuk ke dalam subsistem penunjang dalam sistem agribisnis. Kebijakan-kebijakan yang terdapat di dalam kemitraan jagung Sibermas yang mencakup bimbingan

teknis budidaya, bantuan permodalan dan jaminan pasar dapat menunjang kegiatan pada subsistem agribisnis hulu, subsistem usahatani dan subsistem hilir. Kemitraan jagung Sibermas sudah berlangsung sejak tahun 2007 hingga tahun 2010, di mana dilakukan kerjasama antara perusahaan pakan ternak dengan petani jagung yang tergabung dalam Gapoktan Harapan Jaya di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Kemitraan jagung Sibermas diharapkan akan membantu petani yang tidak memiliki modal, sehingga petani tetap dapat berproduksi dan perusahaan mitra sebagai perusahaan pakan ternak memperoleh jaminan input produksi. Dengan demikian program kemitraan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang bermitra dan mampu berkontribusi kepada peningkatan produksi jagung petani yang selanjutnya berpengaruh terhadap pendapatan petani jagung di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

Pendampingan kepada petani yang tidak secara kontinu dalam sebuah kemitraan dapat menggagalkan desain pengembangan agribisnis jagung. Dinamika yang terjadi pasca pelaksanaan kemitraan pengembangan agribisnis jagung Sibermas, sebagian besar petani di Desa Bandar Agung melakukan peralihan pengusahaan lahan dari tanaman jagung ke ubi kayu. Dengan demikian diperlukan penelitian dari manfaat ekonomi (*land rent*) dari kedua alternatif penggunaan lahan yang dapat memberikan informasi tambahan pendapatan kepada petani di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur. Secara skematis kerangka pemikiran disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Bagan alur kerangka pemikiran pengembangan agribisnis jagung melalui sinergi pemberdayaan potensi masyarakat pedesaan studi dinamika kemitraan petani jagung dengan perusahaan pakan ternak di Kabupaten Lampung Timur, 2011